PONTIANAK POST

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIPA Tahun Anggaran 2020

# Bupati Serahkan ke Satker

ISTIMEWA

**BERSAMA:** Bupati Paolus Hadi berfoto bersama usai penyerahan DIPA 2020 kepada Satker pengelola dana APBN, kemarin.

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

**SANGGAU** – Bupati Sanggau Paolus Hadi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada satuan kerja (Satker) Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerahan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Sanggau pada Jumat (22/11) itu turut disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi.

Kepala KPPN Kabupaten Sanggau, Bulus Lumban Gaol menyampaikan besaran DIPA dan Alokasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk Kabupaten Sanggau berjumlah 32 DIPA dari 25 satuan kerja dengan nominal Rp233,315 milyar.

"Jumlah tersebut naik 0.284 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp232,654 milyar," katanya. Bulus menyebutkan satu DIPA satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan sebesar Rp3,723 milyar dan 31DIPA satuan kerja instansi vertikal kantor daerah sebesar Rp229,591 miliar.

Untuk besaran pagu DIPA tahun 2020 per jenis belanja yakni belanja pegawai sejumlah Rp138,468 milyar atau naik 7,4 persen dibanding tahun 2019 senilai Rp128,926 milyar. Kemudian, belanja barang Rp82,758 milyar atau turun tiga belas persen dibanding tahun 2019 senilai Rp94,779 milyar.

Selanjutnya, kata dia, belanja modal sebesar Rp8,259 milyar atau turun enam persen dibanding tahun 2019 senilai Rp8,802 milyar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp106,500 juta atau turun lima belas persen dari tahun 2019 senilai Rp126 juta.

Terkait alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1,382 triliun atau turun tiga persen dari tahun 2019 senilai Rp1,427 triliun.

"Rinciannya, dana bagi hasil pajak Rp35,786 milyar, dana bagi hasil sumber daya alam Rp18,053 milyar. Kemudian, dana alokasi umum Rp849,509 milyar, dana alokasi khusus fisik Rp165,399 milyar, dana alokasi khusus non fisik Rp124,067 milyar dana insentif daerah Rp35,096 milyar dan dana desa Rp154,512 milyar," jelasnya.

Sementara itu, perkembangan realisasi belanja negara termasuk DAK Fisik dan Dana Desa untuk tahun 2019 di Kabupaten Sanggau sampai dengan tanggal 21 November 2019 yakni pertama, belanja pegawai telah terserap 92,28 persen atau sejumlah Rp243,85 milyar. Kedua, belanja barang terserap 86,86 persen atau Rp183,357 milyar. Ketiga, belanja modal terserap 75,62 persen atau Rp9,297 milyar.

Selanjutnya, keempat, belanja bantuan sosial terserap 44,21 persen atau Rp106,650 juta. Kelima, DAK Fisik telah disalurkan sebesar 70,96 persen atau Rp137,803 milyar dan keenam, Dana Desa telah disalurkan seratus persen sejumlah Rp149,860 milyar.

Bupati Paolus Hadi menyampaikan jumlah yang didapat Kabupaten Sanggau secara keseluruhan senilai Rp1,6 triliun. Dana tersebut yang akan dikelola dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah daerah itu Rp1,3 triliun dan itu turun. Turunnya (Jumlah itu) dari DAK, cuma dana insentifnya naik karena prestasi Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu lima tahun berturut-turut memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mudah-mudahan bisa dipertahankan. Semoga tahun depan jadi lebih baik," katanya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih fokus pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan yang direncanakan sejalan dengan pemerintah pusat yang menginginkan peningkatan sumber daya manusia. "Kenapa infrastruktur masih menjadi prioritas utama, karena selama saya kampanye keluhan masyarakat masih berkaitan dengan infrastruktur. Tentu infrastruktur yang dimaksud yakni yang menunjang pembangunan sumber daya manusia," ujarnya. ***(sgg)***